



**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KELAS I B**

LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

**Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2024
(400371)**



(0622) 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Simalungun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Simalungun. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Simalungun, 25 Oktober 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ruben Harlen Panjaitan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	xi
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	15
V. Catatan atas Laporan Keuangan	19
A. Penjelasan	19
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Simalungun	19
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.3. Basis Akuntansi	21
A.4. Dasar Pengukuran	21
A.5. Kebijakan Akuntansi	21
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran	28
B.1. Pendapatan	28
B.2. Belanja	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
C.1. Aset Lancar	34
C.2. Aset Tetap	36
C.3. Aset Lainnya	36
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.5. Ekuitas	38
D. Penjelasan Atas Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
D.2. Beban Pegawai	39
D.3. Beban Persediaan	40
D.4. Beban Barang dan Jasa	40

D.5. Beban Pemeliharaan	41
D.6. Beban Perjalanan Dinas	42
D.7. Kegiatan Non Operasional	43
D.8. Pos Luar Biasa	43
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (Defisit) LO	44
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	44
E.4. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	44
E.5. Transaksi Antar Ekuitas	45
E.6. Ekuitas Akhir	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	48
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	48
Lampiran dan Daftar	53



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Simalungun, 25 Oktober 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ruben Harlen Panjaitan

NIP. 198112232009041004

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun Periode Triwulan III Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September 2024 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp49.050.118 atau mencapai 63,74% dari estimasi pendapatan sebesar Rp76.952.000 .

Realisasi Belanja Negara per 30 September 2024 adalah sebesar Rp238.761.300 atau mencapai 76,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp312.500.000 .

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.092.891.862 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp4.103.189.887 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas tersaji sebesar (Rp10.298.025).

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp49.050.118, sedangkan jumlah Beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp260.160.343, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp211.110.225). Surplus/Defisit

Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0 dan Pos-Pos Luar Biasa senilai Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp211.110.225).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.868.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp211.110.225), kemudian dikurangi dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp0, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp197.944.200, sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai (Rp10.298.025).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	76.952.000	49.050.118	(27.901.882)	63,74	110.792.708
Jumlah Pendapatan dan Hibah		76.952.000	49.050.118	(27.901.882)	63,74	110.792.708
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.2.2	312.500.000	238.761.300	(73.738.700)	76,40	267.695.000
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		312.500.000	238.761.300	(73.738.700)	76,40	267.695.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Neraca

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	20.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	4.068.425.862	0
Persediaan	C.1.3	4.466.000	2.868.000
Jumlah Aset Lancar		4.092.891.862	2.868.000
Aset Tetap	C.2		
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3		
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		4.092.891.862	2.868.000
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	4.068.425.862	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	14.764.025	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	20.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.103.189.887	0
Jumlah Kewajiban		4.103.189.887	0
Ekuitas			

Ekuitas	C.5	(10.298.025)	2.868.000
Jumlah Ekuitas		(10.298.025)	2.868.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		4.092.891.862	2.868.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Laporan Operasional

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	49.050.118	110.792.708
Jumlah Pendapatan		49.050.118	110.792.708
Beban			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	112.791.018	149.037.599
Beban Barang dan Jasa	D.4	97.119.325	38.003.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	54.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.250.000	85.650.000
Jumlah Beban		260.160.343	272.744.599
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(211.110.225)	(161.951.891)
Kegiatan Non Operasional	D.7	0	0
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(211.110.225)	(161.951.891)

Pos Luar Biasa	D.13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(211.110.225)	(161.951.891)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM SATUAN RUPIAH)

Uraian	Cat.	2024	2023
Ekuitas Awal	E.1	2.868.000	3.789.500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(211.110.225)	(161.951.891)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	0	0
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	197.944.200	164.946.391
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(13.166.025)	2.994.500
Ekuitas Akhir	E.6	(10.298.025)	6.784.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Simalungun

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang beralamat di Jalan Asahan Km. 4 Kabupaten Simalungun, diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu Bapak M. Roesli, S.H. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi **”Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”**.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri Simalungun bekerja dengan moto **“BERAKSI”**, yaitu **Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif, dan Inovatif**. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun juga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata;
 2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata;
 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA

- ✓ Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ✓ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ✓ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- ✓ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ✓ Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- ✓ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ✓ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- ✓ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ✓ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ✓ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ✓ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- ✓ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ✓ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ✓ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- ✓ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- ✓ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ✓ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - ii. piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- ✓ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- ✓ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ✓ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- ✓ Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ✓ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ✓ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- ✓ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- ✓ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- ✓ Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- ✓ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ✓ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- ✓ Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- ✓ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✓ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- ✓ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ✓ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ✓ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- ✓ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- ✓ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✓ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✓ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Pos-Pos LRA

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp312.500.000. Sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024, telah dilakukan revisi atas DIPA awal yang disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNB	76.952.000	76.952.000
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	76.952.000	76.952.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	312.500.000	312.500.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	312.500.000	312.500.000

B.1. Pendapatan

Realisasi

Pendapatan :

Rp49.050.118

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp49.050.118 dengan estimasi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.952.000. Pendapatan Negara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	76.952.000	49.050.118	63,74
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Total Pendapatan	76.952.000	49.050.118	63,74

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar Rp61.742.590 atau 55,73% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penurunan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyediaan layanan hukum dan peradilan pada Pengadilan, maupun pada PNBP yang diperoleh melalui jasa giro pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai penampung biaya perkara.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 September 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	49.050.118	110.792.708	(61.742.590)	(55,73)
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00
Total Pendapatan	49.050.118	110.792.708	(61.742.590)	(55,73)

B.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**Realisasi****Pendapatan PNBPNP :****Rp49.050.118**

Realisasi Pendapatan PNBPNP untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.050.118 dan Rp110.792.708. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPNP

(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	0	40.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	4.200.000	5.610.000	(1.410.000)	(25,13)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.015.000	15.560.000	(2.545.000)	(16,36)
4.	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	30.328.000	50.935.500	(20.607.500)	(40,46)
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.467.118	38.687.208	(37.220.090)	(96,21)
Total Pendapatan		49.050.118	110.792.708	(61.742.590)	(55,73)

Sehubungan dengan adanya PNBPNP yang berasal dari jasa giro pada Rekening Pemerintah Lainnya, hal ini terjadi karena Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perubahan Rekening Penampung Biaya Perkara, semula pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadi rekening pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bank BTN mendukung layanan perbankan berbasis elektronik/e-banking yang mempermudah transaksi/pembayaran untuk biaya perkara, dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan e-Court serta e-Litigasi pada Pengadilan Negeri Simalungun. Pendapatan jasa giro senilai Rp1.467.118 tersebut diperoleh pada periode Juni 2024 dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara serta telah dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja

Negara :

Rp238.761.300

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024 adalah sebesar Rp238.761.300 atau sebesar 76,40% persen dari anggaran belanja senilai Rp312.500.000. Sampai dengan periode 30 September 2024 tidak terdapat pengembalian belanja. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	312.500.000	238.761.300	76,40
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	312.500.000	238.761.300	76,40
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Neto	312.500.000	238.761.300	76,40

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp28.933.700 atau sebesar 10,81% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut seluruhnya merupakan penurunan pada realisasi belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja per 30 September 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	238.761.300	267.695.000	(28.933.700)	(10,81)
Belanja Modal	0	0	0	0,00

Total Belanja	238.761.300	267.695.000	(28.933.700)	(10,81)
---------------	-------------	-------------	--------------	---------

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp0

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Bagian Anggaran 005.03 Tahun Anggaran 2024 tidak memuat pagu Belanja Pegawai.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp238.761.300

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp238.761.300 dan Rp267.695.000.

Realisasi Belanja Barang per 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.933.700 atau sebesar 10,81% dari realisasi per 30 September 2023. Selain karena berkurangnya pagu belanja barang Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, penurunan realisasi barang juga disebabkan antara lain oleh :

1. Menurunnya realisasi belanja barang persediaan dalam bentuk barang konsumsi/habis pakai berupa alat tulis kantor yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Menurunnya volume perjalanan dinas dalam kota, diantaranya perjalanan dinas untuk pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, serta pengiriman petikan/salinan putusan. Penurunan volume perjalanan dinas tersebut terjadi sehubungan dengan telah diberlakukannya sistem surat tercatat dalam proses persidangan dan administrasi pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yaitu PT Pos Indonesia (Persero).

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	8.498.800	8.114.000	384.800	4,74
Belanja Barang Non Operasional	56.062.500	8.905.000	47.157.500	529,56

Belanja Barang Persediaan	99.950.000	145.476.000	(45.526.000)	(31,29)
Belanja Jasa	24.000.000	20.900.000	3.100.000	14,83
Belanja Perjalanan Dinas	50.250.000	84.300.000	(34.050.000)	(40,39)
Total Belanja Bruto	238.761.300	267.695.000	(28.933.700)	(10,81)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Neto	238.761.300	267.695.000	(28.933.700)	(10,81)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal : Rp0*

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Bagian Anggaran 005.03 Tahun Anggaran 2024 tidak memuat pagu Belanja Modal.

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar :
Rp4.092.891.862

Nilai Aset Lancar per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.092.891.862 dan Rp2.868.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.068.425.862	0
Persediaan	4.466.000	2.868.000
Total Aset Lancar	4.092.891.862	2.868.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp20.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Uang Persediaan RM	20.000.000	0
Jumlah	20.000.000	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas Lainnya dan
Setara Kas :
Rp4.068.425.862**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.068.425.862 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	4.068.425.862	0
Jumlah	4.068.425.862	0

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 seluruhnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Saldo tersebut merupakan dana pihak ketiga berupa biaya perkara yang terdapat pada Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun.

C.1.3. Persediaan

**Persediaan :
Rp4.466.000**

Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.466.000 dan Rp2.868.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	4.466.000	2.868.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	4.466.000	2.868.000

Barang Konsumsi per 30 September 2024 tersebut merupakan alat tulis kantor yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp0

Neraca Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024 tidak memuat Aset Tetap.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya :
Rp0

Neraca Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024 tidak memuat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp4.103.189.887

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.103.189.887 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	4.068.425.862	0
Utang yang Belum Ditagihkan	14.764.025	0

Uang Muka dari KPPN	20.000.000	0
Jumlah	4.103.189.887	0

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

**Utang Kepada Pihak
Ketiga :
Rp4.068.425.862**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.068.425.862 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam satuan rupiah)

Uraian	30 September 2024	31 Desember 2023
Dana Pihak Ketiga (Biaya Perkara)	4.068.425.862	0
Jumlah	4.068.425.862	0

Adapun Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 seluruhnya merupakan dana pihak ketiga berupa biaya perkara yang terdapat pada Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun.

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

**Utang yang Belum
Ditagihkan :
Rp14.764.025**

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.764.025 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

(dalam satuan rupiah)

Jenis	30 September 2024	31 Desember 2023
Kuitansi UP yang Belum Dipertanggungjawabkan	14.764.025	0
Jumlah	14.764.025	0

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN : Rp20.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20.000.000 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di berikut ini :

Rincian Uang Muka dari KPPN

(dalam satuan rupiah)

Jenis	30 September 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0
Jumlah	20.000.000	0

C.5. Ekuitas

Ekuitas :
(Rp10.298.025)

Nilai Ekuitas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp10.298.025) dan Rp2.868.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp13.166.025 atau sebesar 459,07% dari nilai Ekuitas per 31 Desember 2023.

D. Penjelasan Atas Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB :
Rp49.050.118

Jumlah Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp49.050.118 dan Rp110.792.708. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan PNB

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	0	40.000	0,00
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	4.200.000	5.610.000	(1.410.000)	(25,13)
Pendapatan Ongkos Perkara	13.015.000	15.560.000	(2.545.000)	(16,36)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.328.000	50.935.500	(20.607.500)	(40,46)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.467.118	38.687.208	0	0,00
Total Pendapatan	49.050.118	110.792.708	(61.742.590)	(55,73)

Pendapatan PNB per 30 September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp61.742.590 atau sebesar 55,73%. Penurunan ini disebabkan oleh :

1. Menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyediaan berbagai layanan hukum dan peradilan;
2. Menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Jasa Giro pada Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp0

Tidak terdapat Beban Pegawai pada Laporan Operasional Pengadilan Negeri Simalungun per 30 September 2024.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp112.791.018

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp112.791.018 dan Rp149.037.599. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	112.791.018	149.037.599	(36.246.581)	(24,32)
Total Beban Persediaan	112.791.018	149.037.599	(36.246.581)	(24,32)

Beban Persediaan per 30 September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp36.246.581 atau sebesar 24,32%. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya volume pemakaian barang-barang konsumsi/habis pakai berupa alat tulis kantor yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun. Alat tulis kantor pada proses penyelesaian perkara pidana digunakan antara lain untuk proses pendaftaran perkara, pemeriksaan di persidangan, minutasi, pengiriman salinan putusan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan Terdakwa, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, serta proses dan/atau tahapan lain dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama.

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang dan
Jasa : Rp97.119.325**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp97.119.325 dan Rp38.003.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.381.825	8.198.000	3.183.825	38,84
Beban Bahan	61.737.500	8.905.000	52.832.500	593,29
Beban Jasa Konsultan	24.000.000	20.900.000	3.100.000	14,83
Total Beban Jasa	97.119.325	38.003.000	59.116.325	155,56

Beban Barang dan Jasa per 30 September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp59.116.325 atau sebesar 155,56%. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Meningkatnya beban pengiriman surat dinas/berkas perkara melalui pos pusat. Peningkatan ini terjadi antara lain karena diberlakukannya sistem surat tercatat dalam proses persidangan dan administrasi pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yaitu PT Pos Indonesia (Persero);
2. Meningkatnya beban bahan berupa biaya penggandaan dan penjilidan berkas-berkas dalam proses penyelesaian perkara pidana;
3. Meningkatnya beban jasa konsultan berupa honor advokat/pengacara piket pada Layanan Posbakum. Hal ini terjadi karena pagu belanja jasa konsultan juga turut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan : Rp0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp54.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang telah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	54.000	(54.000)	(100,00)
Total Beban Pemeliharaan	0	54.000	(54.000)	(100,00)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan

Dinas : Rp50.250.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.250.000 dan Rp85.650.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	50.250.000	85.650.000	(35.400.000)	(41,33)
Total Beban Perjalanan Dinas	50.250.000	85.650.000	(35.400.000)	(41,33)

Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp35.400.000 atau sebesar 41,33%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya frekuensi perjalanan dinas dalam kota seiring dengan telah diberlakukannya sistem surat tercatat dalam proses persidangan dan administrasi pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebelum diberlakukannya sistem

surat tercatat, perjalanan dinas dalam kota pada Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan dalam rangka pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pengiriman salinan/petikan putusan, maupun pemberitahuan proses atau putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar.

D.7. Kegiatan Non Operasional

**Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional : Rp0**

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Triwulan III 2024	Triwulan III 2023	Perubahan	
			Rp	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Total Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0,00

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 September 2024 sebesar Rp0.

D.8. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa : Rp0

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal :
Rp2.686.000

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.686.000 dan Rp3.789.500.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO :
(Rp211.110.225)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp211.110.225) dan (Rp161.951.891). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi : Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset : Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan : Rp0

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan (dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0

Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap : Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi : Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain :
Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Ekuitas

Transaksi Antar
Ekuitas :
Rp197.944.200

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp197.944.200 dan Rp164.946.391.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Ekuitas

(dalam satuan rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(49.050.118)
Ditagikan ke Entitas Lain	238.761.300
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	8.233.018
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	197.944.200

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL :
(Rp49.050.118);
DKEL : Rp238.761.300

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2024, DDEL sebesar (Rp49.050.118) sedangkan DKEL sebesar Rp238.761.300.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk :
Rp8.233.018,
Transfer Keluar :
Rp0

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk pada Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp8.233.018 yang terdiri dari :

Rincian Transfer Masuk

(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan (Buku Agenda Sidang, Buku-Buku Pengadilan, Register Pengadilan, dan	Pengadilan Tinggi Medan	8.233.018

	Perlengkapan Persidangan Lainnya)		
Jumlah			8.233.018

Tidak terdapat transfer keluar dari Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan periode pelaporan pada 30 September 2024.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
Langsung : Rp0,
Pengesahan
Pengembalian Hibah
Langsung : Rp0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pengesahan Hibah Langsung

(dalam satuan rupiah)

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	0
2.	-	-	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per 30 September 2024 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
(Rp10.298.025)*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp10.298.025) dan Rp6.784.000.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca

Sampai dengan Laporan Keuangan ini selesai disusun tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang mempengaruhi Laporan Keuangan sehingga layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Temuan dan Tindak
Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 ini.

F.2.2. Informasi Rekening Satker

Informasi Rekening
Satker

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker sampai dengan periode 30 September 2024 terdiri dari rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya.

Rincian rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker adalah sebagai berikut :

Rekening Bendahara
Pengeluaran

1. Rekening Bendahara Pengeluaran

No.	Bank	Rekening Induk	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Akhir per 30 September 2024
1.	BRI	RKK DITJEN BADILUM O	BPG 005 PN SIMALUNGUN	654444003711000	Rp3.194.000

Rekening
Pemerintah Lainnya

2. Rekening Pemerintah Lainnya

No.	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Akhir per 30 September 2024
1.	BTN KC Pematangsiantar	RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	00069-01-30-000175-6	Rp4.068.425.862

F.2.3. Revisi DIPA

Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023, *digital stamp* : 6890-3527-2542-4070, telah mengalami revisi sebanyak tiga kali sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 tanggal 7 Februari 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap

- berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke-2 tanggal 19 April 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
 - Revisi ke-3 tanggal 9 Juli 2024, merupakan revisi pagu anggaran tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB pada Pengadilan Negeri Simalungun pada periode Triwulan III Tahun 2024.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Capaian Output Berdasarkan Fungsi APBN

1. Capaian Output Berdasarkan Fungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun antara lain sebagai berikut:

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun

Triwulan III Tahun 2024

Kementerian : Mahkamah Agung Republik Indonesia (005)

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)

Satker : Pengadilan Negeri Simalungun (400371)

Fungsi : Ketertiban dan Keamanan (03)

Sub Fungsi : Peradilan (03.04)

Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF)

Lokasi : Sumatera Utara/Kab. Simalungun (07.05)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000							
AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00	2	2	Kegiatan	100,00	

BCA. U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	275.000.000	213.261.300	77,55	327	254	Perkara	77,68	
QBA. 032	Layanan Posbakum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	24.000.000	66,67	91	123	Orang	135,16	
	Subtotal	312.500.000	238.761.300	76,40					
	Penyesuaian	0	0	0					
	Total	312.500.000	238.761.300	76,40					

Capaian Output
Prioritas Nasional

2. Capaian Output Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Simalungun terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII dari 7 Prioritas yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Prioritas Nasional VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan Prioritas Nasional ini melalui satu program prioritas dan satu kegiatan prioritas pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan pagu anggaran sebesar Rp36.000.000 dan realisasi pada periode pelaporan per 30 September 2024 sebesar Rp24.000.000 (66,67%), dengan rincian sebagai berikut :

Kementerian : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Satker : Pengadilan Negeri Simalungun

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000	24.000.000	66,67	Orang	91	123	135,16
Jumlah	36.000.000	24.000.000	66,67	Orang	91	123	135,16

3. Daftar Pejabat Perbendaharaan

Daftar Pejabat Perbendaharaan

3.1. Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun atas nama Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom., sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

3.2. Pejabat Pembuat Komitmen

Luky Afriani Sebayang, S.Kom., sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.3. Pejabat Penandatanganan SPM

Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E., sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.4. Bendahara Pengeluaran

Yosi Halmahera Sipayung, A.Md., sesuai dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 363/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

3.5. Bendahara Penerimaan

Nova Carolina Ginting, S.E. sesuai dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 364/SEK.PN.W2-U16/SK.KU1.1.1/VI/2024 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

**Laporan Biaya
Perkara**

4. Laporan Biaya Perkara

Laporan biaya perkara per 30 September 2024 untuk Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar terlampir pada daftar data dukung Laporan Keuangan ini.

Lampiran dan Daftar

Pengadilan Negeri Simalungun
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2024
(dalam satuan rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 SEPTEMBER 2024						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
NIHIL									
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	

Pengadilan Negeri Simalungun
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2024
(dalam satuan rupiah)

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-		-	

Daftar Data Dukung

Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal)
Neraca Percobaan Akrual
Neraca Percobaan Kas
LRA Belanja Menurut Akun
LRA Belanja Menurut Sumber Dana / Jenis Belanja / Akun
LRA Belanja Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan
LRA Menurut Sumber Dana / Program / Kegiatan / Output
LRA Pendapatan Menurut Akun
Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
Laporan Posisi BMN di Neraca
Laporan Persediaan
Laporan Biaya Perkara per 30 September 2024
Kertas Kerja Telaah
DIPA Petikan 400371 T.A. 2024
Rincian Kertas Kerja T.A. 2024
LPJ BPG 400371 Periode September 2024
LPJ BPN 400371 Periode September 2024
Rekening Koran BPG 400371
Rekening Koran RPL
Permohonan Persetujuan Perubahan Bank RPL
Laporan Pembukaan RPL pada BTN KC. Pematangsiantar
Laporan Penutupan RPL pada BRI KC. Pematangsiantar
Surat Pernyataan KPA Terkait Pendapatan Jasa Giro
BAST Transfer Masuk Persediaan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 16/10/24 8:14 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	49,050,118	110,792,708	(61,742,590)	(55.728)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	49,050,118	110,792,708	(61,742,590)	(55.728)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	49,050,118	110,792,708	(61,742,590)	(55.728)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	112,791,018	149,037,599	(36,246,581)	(24.32)
Beban Barang dan Jasa	97,119,325	38,003,000	59,116,325	155.557
Beban Pemeliharaan	0	54,000	(54,000)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	50,250,000	85,650,000	(35,400,000)	(41.331)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 16/10/24 8:14 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	260,160,343	272,744,599	(12,584,256)	(4.614)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(211,110,225)	(161,951,891)	(49,158,334)	30.354
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(211,110,225)	(161,951,891)	(49,158,334)	30.354
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(211,110,225)	(161,951,891)	(49,158,334)	30.354

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:14 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,868,000	3,789,500	(921,500)	(24.32)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(211,110,225)	(161,951,891)	(49,158,334)	30.35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	197,944,200	164,946,391	32,997,809	20.01
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(13,166,025)	2,994,500	(16,160,525)	(539.67)
EKUITAS AKHIR	(10,298,025)	6,784,000	(17,082,025)	(251.8)

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 400371

Tgl Data : 16/10/24 12:37 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:16 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	76,952,000	49,050,118	(27,901,882)	64	51,140,000	110,792,708	(59,652,708)	217
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	76,952,000	49,050,118	(27,901,882)	64	51,140,000	110,792,708	(59,652,708)	217
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	76,952,000	49,050,118	(27,901,882)	64	51,140,000	110,792,708	(59,652,708)	217
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	312,500,000	238,761,300	(73,738,700)	76	337,700,000	267,695,000	70,005,000	79
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	312,500,000	238,761,300	(73,738,700)	76	337,700,000	267,695,000	70,005,000	79
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 400371

Tgl Data : 16/10/24 12:37 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:16 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	312,500,000	238,761,300	(73,738,700)	76	337,700,000	267,695,000	70,005,000	79
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:17 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,068,425,862	0	4,068,425,862	0.00
Persediaan	4,466,000	2,868,000	1,598,000	55.72
JUMLAH ASET LANCAR	4,092,891,862	2,868,000	4,090,023,862	142,608.92
JUMLAH ASET	4,092,891,862	2,868,000	4,090,023,862	142,608.92
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,068,425,862	0	4,068,425,862	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,764,025	0	14,764,025	0.00
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,103,189,887	0	4,103,189,887	
JUMLAH KEWAJIBAN	4,103,189,887	0	4,103,189,887	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(10,298,025)	2,868,000	(13,166,025)	(459.07)
JUMLAH EKUITAS	(10,298,025)	2,868,000	(13,166,025)	(459.07)
JUMLAH EKUITAS	(10,298,025)	2,868,000	(13,166,025)	(459.07)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,092,891,862	2,868,000	4,090,023,862	142,608.92

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
SUMATERA UTARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 16/10/2024 8:20 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,868,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,868,000
JUMLAH			2,868,000	2,868,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 12:37 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:17 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	4,068,425,862	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,466,000	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,068,425,862
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,764,025
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	238,761,300
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	49,050,118	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,233,018
0.0	391111	Ekuitas	0	2,868,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	40,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,200,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,015,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	30,328,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,381,825	0
3.0	521211	Beban Bahan	61,737,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	24,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	112,791,018	0
JUMLAH			4,402,102,323	4,402,102,323

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 16/10/24 8:18 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	238,761,300
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	49,050,118	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	40,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,200,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,015,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	30,328,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,498,800	0
3.0	521211	Belanja Bahan	56,062,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,950,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,250,000	0
JUMLAH			287,811,418	287,811,418

Keterangan :
FINAL

SIMALUNGUN, 16 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
198112232009041004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 400371 **PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/10/24 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/10/24 7:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,246,000	18,486,000	8,498,800	0	8,498,800	45.97	9,987,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,246,000	18,486,000	8,498,800	0	8,498,800	45.97	9,987,200
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	63,080,000	63,080,000	56,062,500	0	56,062,500	88.88	7,017,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,080,000	63,080,000	56,062,500	0	56,062,500	88.88	7,017,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,674,000	144,534,000	99,950,000	0	99,950,000	69.15	44,584,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,674,000	144,534,000	99,950,000	0	99,950,000	69.15	44,584,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109,500,000	50,400,000	50,250,000	0	50,250,000	99.7	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	109,500,000	50,400,000	50,250,000	0	50,250,000	99.7	150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH BELANJA	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/10/24 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,246,000	18,486,000	8,498,800	0	8,498,800	45.97	9,987,200
521211	Belanja Bahan	63,080,000	63,080,000	56,062,500	0	56,062,500	88.88	7,017,500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,674,000	144,534,000	99,950,000	0	99,950,000	69.15	44,584,000
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109,500,000	50,400,000	50,250,000	0	50,250,000	99.7	150,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH RUPIAH MURNI	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	TOTAL	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
SATUAN KERJA : 400371

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 16/10/24 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : null **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 400371 **PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/10/24 8:20 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 1049 AEA 52 5241 524113	RUPIAH MURNI Peningkatan Manajemen Peradilan Umum null BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.AEA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
BCA 52 5211 521114	Perkara Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat							
		18,246,000	18,486,000	8,498,800	0	8,498,800	45.97	9,987,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,246,000	18,486,000	8,498,800	0	8,498,800	45.97	9,987,200
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		63,080,000	63,080,000	56,062,500	0	56,062,500	88.88	7,017,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,080,000	63,080,000	56,062,500	0	56,062,500	88.88	7,017,500
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi							
		85,674,000	144,534,000	99,950,000	0	99,950,000	69.15	44,584,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	85,674,000	144,534,000	99,950,000	0	99,950,000	69.15	44,584,000
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		108,000,000	48,900,000	48,750,000	0	48,750,000	99.69	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	108,000,000	48,900,000	48,750,000	0	48,750,000	99.69	150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	275,000,000	275,000,000	213,261,300	0	213,261,300	77.55	61,738,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.BCA	275,000,000	275,000,000	213,261,300	0	213,261,300	77.55	61,738,700
QBA 52 5221 522131	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultan							
		36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.67	12,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.QBA	36,000,000	36,000,000	24,000,000	0	24,000,000	66.667	12,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 005
: 03
: null
: 400371
: KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
SUMATERA UTARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/10/24 8:20 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1049	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700
	JUMLAH BELANJA	312,500,000	312,500,000	238,761,300	0	238,761,300	76.4	73,738,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/10/24 8:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	140,000	40,000	0	40,000	28.57
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,110,000	4,200,000	0	4,200,000	59.07
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	16,280,000	13,015,000	0	13,015,000	79.94
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	53,422,000	30,328,000	0	30,328,000	56.77
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	76,952,000	47,583,000	0	47,583,000	61.83
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118	0	1,467,118	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	1,467,118	0	1,467,118	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	76,952,000	49,050,118	0	49,050,118	63.74
	JUMLAH PENDAPATAN	76,952,000	49,050,118	0	49,050,118	63.74

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tanggal : 16/10/24 8:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,868,000
J U M L A H		2,868,000

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl.Data : 16/10/24 6:22 AM
Tgl.Cetak : 16/10/24 8:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,466,000
J U M L A H		4,466,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 16/10/24 6:22 AM
Tanggal : 16/10/24 8:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,027,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	351,000
1010301003	Penjepit Kertas	275,000
1010301006	Ordner Dan Map	402,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	122,000
1010301010	Alat Perekat	174,000
1010301013	Isi Staples	40,000
1010302001	Kertas HVS	900,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	130,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	45,000
Jumlah Barang Konsumsi		4,466,000
TOTAL		4,466,000

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PERIODE 1 JANUARI 2024 S/D 30 SEPTEMBER 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (07) Sumatera Utara
Satuan Kerja : (400371) Pengadilan Negeri Simalungun

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
Januari s.d. September 2024	Biaya Perkara	179.045.996,00	332.317.000,00	340.550.370,00	170.812.626,00	152.659.626,00	18.153.000,00
	Biaya Eksekusi	237.363.500,00	809.060.610,00	764.103.610,00	282.320.500,00	282.320.500,00	0,00
	Biaya Konsinyasi	9.650.284.178,00	1.453.217.281,00	7.470.055.723,00	3.633.445.736,00	3.633.445.736,00	0,00
Jumlah		10.066.693.674,00	2.594.594.891,00	8.574.709.703,00	4.086.578.862,00	4.068.425.862,00	18.153.000,00

Simalungun, 16 Oktober 2024
Sekretaris,



Ruben Harlen Panjaitan

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TRIWULAN III (SEPTEMBER) TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
 Kode dan Nama UAPPAW : (07) SUMATERA UTARA
 Kode dan Nama Eselon I : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)		Ada	Tidak
1.	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2.	LRA, Neraca, LO dan LPE face	V	Ada
3.	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1.	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V	Ada
2.	Neraca Percobaan AkruaI	V	Ada
3.	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4.	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi SAKTI/MonSAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2023?	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1.	Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2.	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3.	Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECHEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List		Ada	Tidak
1.	Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V
2.	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V
3.	Terdapat Persediaan belum Diditlkan per tanggal pelaporan		V
4.	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V

5.	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V	Tidak
6.	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7.	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8.	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9.	Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10.	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11.	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12.	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2.	Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3.	Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNPB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
Rekon Internal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan		V	Tidak

	Akrual			
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai decimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak

3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	0		
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	0		
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya

1.	Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrua?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-Pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		N/A	Ya
	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak

	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas		N/A	Ya

	LAK?			
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI"</i>				

Mengetahui,
Pejabat Penyusun LKKL,

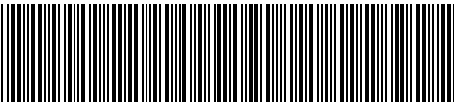


Ruben Harlen Panjaitan
NIP. 198112232009041004

Penelaah,



Luky Afriani Sebayang
NIP. 198404152009122003



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400371/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 03
Tanggal : 09 Juli 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
- 4. Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
- Sebesar : Rp. 312.500.000 (TIGA RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 312.500.000
Rp. 312.500.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 312.500.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEMATANG SIANTAR (005) Rp. 312.500.000

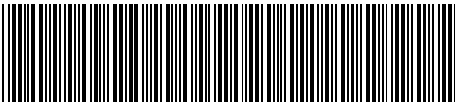
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				312.500.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				312.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	-				
		7. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan		1.500.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	2.00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	327,00	Perkara, Berkas Perkara		275.000.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	327.00	Perkara		275.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	91,00	Orang		36.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	91.00	Orang		36.000.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
I B. SUMBER DANA



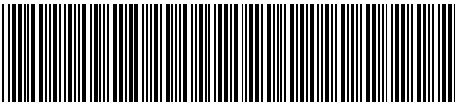
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	312.500.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	312.500.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Kewenangan : (KD)

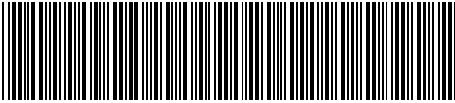
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	-	312.500	-	-	-	312.500	07 . 05	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	312.500	-	-	-	312.500		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	312.500	-	-	-	312.500		
1049.AEA	Koordinasi (07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)	-	1.500	-	-	-	1.500		
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (07.00 SUMATERA UTARA / SUMATERA UTARA)	-	275.000	-	-	-	275.000		
01	RM	-	275.000	-	-	-	275.000		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (07.05 SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN)	-	36.000	-	-	-	36.000		
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	005	
JUMLAH		-	312.500	-	-	-	312.500		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

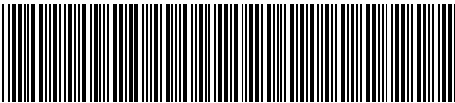
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	35.050	23.000	23.750	24.655	23.000	26.000	312.500	
		BELANJA BARANG	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	35.050	23.000	23.750	24.655	23.000	26.000	312.500	
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	35.050	23.000	23.750	24.655	23.000	26.000	312.500	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.138	22.987	32.994	23.000	27.566	28.362	35.050	23.000	23.750	24.655	23.000	26.000	312.500	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410	6.442	76.952	
		- PNBP (425231)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	19	140	
		- PNBP (425232)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	598	7.110
		- PNBP (425233)	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.364	16.280
		- PNBP (425239)	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.451	4.461	53.422

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
IV A. B L O K I R



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

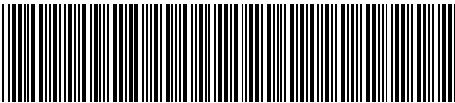
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400371/2024
IV B. C A T A T A N



DS:6890-3527-2542-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [400371] PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA PN SIMALUNGUN T.A. 2024 REVISI KE-3

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(400371)

Rp. 312,500,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			312,500,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			312,500,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	2.0 kegiatan		1,500,000	

	Lokasi : KAB. SIMALUNGUN				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	2.0 kegiatan		1,500,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			1,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Perjalanan KIMWASMAT	10.0 OK	150,000	1,500,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	327.0 Perkara, Berkas Perkara		275,000,000	

	Lokasi : SUMATERA UTARA				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	327.0 Perkara		275,000,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			149,439,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			149,439,000	
521211	Belanja Bahan			4,905,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	327.0 PKR	15,000	4,905,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			144,534,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Alat Tulis Kantor	327.0 PKR	442,000	144,534,000	
052	Penetapan hari sidang			150,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			150,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			150,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang	1.0 OK	150,000	150,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			18,650,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			18,650,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			3,800,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	190.0 OK	20,000	3,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			14,850,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	99.0 OK	150,000	14,850,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			50,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA PN SIMALUNGUN T.A. 2024 REVISI KE-3

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(400371)

Rp. 312,500,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			50,000,000	U
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	1500.0 OK	25,000	37,500,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Polisi	500.0 OK	25,000	12,500,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			8,990,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,990,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			4,040,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	202.0 OK	20,000	4,040,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,950,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	33.0 OK	150,000	4,950,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			8,175,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,175,000	
521211	Belanja Bahan			8,175,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	327.0 PKR	25,000	8,175,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			20,146,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,146,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			3,046,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Berkas Perkara Banding	100.0 PKR	30,460	3,046,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			17,100,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	68.0 OK	150,000	10,200,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	46.0 OK	150,000	6,900,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			19,450,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			19,450,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			7,600,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	95.0 PKR	80,000	7,600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11,850,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	55.0 OK	150,000	8,250,000	
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	24.0 OK	150,000	3,600,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	91.0 Orang		36,000,000	
	Lokasi : KAB. SIMALUNGUN				
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	91.0 Orang		36,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA PN SIMALUNGUN T.A. 2024 REVISI KE-3

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(400371)

Rp. 312,500,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pos Bantuan Hukum			36,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			36,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			36,000,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar)				
	- Honor Advokat/Pengacara Piket [1 ORG x 15 KEG x 12 BLN x 2 JAM	360.0 OJ	100,000	36,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

SIMALUNGUN, 10 Juli 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RUBEN HARLEN PANJAITAN
NIP 198112232009041004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.03.2.400371/2024

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN

KPPN : (005) Pematang Siantar

Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 5.235.975,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00297/KW/400371/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	1.727.000,00	26.237.716,00	22.728.741,00	5.235.975,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.727.000,00	26.237.716,00	22.728.741,00	5.235.975,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	1.727.000,00	20.991.216,00	17.482.241,00	5.235.975,00
	1. BP UP*)	1.727.000,00	20.000.000,00	16.491.025,00	5.235.975,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	241.216,00	241.216,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 14.764.025,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	2.041.975,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	3.194.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	5.235.975,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	5.235.975,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	5.235.975,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	5.235.975,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	14.764.025,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom

NIP 198404152009122003

KAB. SIMALUNGUN, 30 September 2024

Bendahara Pengeluaran

YOSI HALMAHERA SIPAYUNG

NIP 199512062019032005

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan September tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654444003711000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 5.235.975 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00297/KW/400371/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	5.235.975
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	5.235.975

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	5.235.975
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	5.235.975

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	2.041.975
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	3.194.000
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	5.235.975

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0
----	----------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	5.235.975
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	14.764.025
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	20.000.000
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	20.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	20.000.000
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	20.000.000

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


YOSI HALIMAHERA SIPAYUNG
NIP 199512062019032005

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom
NIP 198404152009122003

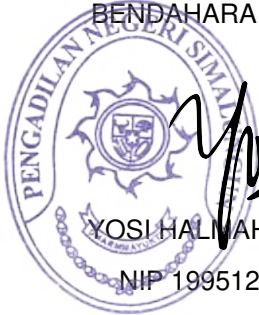
***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 400371

BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	6544444003711000	BPG 005 PN SIMALUNGUN	BRI Cabang Pematangsiantar	20	S-761/PB.3/2021	21-04-2021	2024-09-27	3,194,000.00

BENDAHARA PENGELUARAN



YOSI HALIMAHERA SIPAYUNG
NIP 199512062019032005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : SEPTEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Propinsi / Kabupaten / Kota : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN

Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN40037100-

No Rekening : 654444003711000

Nama Rekening : BPG 005 PN SIMALUNGUN

Nama Bank : BRI Cabang Pematangsiantar

Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Agustus 2024			246.500,00
05-09-2024	FPK-PENG-IVAQoSAdjuBYVvn	[DARI TUNAI] Penarikan Uang Tunai	0,00	246.500,00	0,00
09-09-2024	FPK-PENG-Lu3Vofc0FRHLQ2g	GUP 400371	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10-09-2024	00283/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 21 Agustus 2024 Sebanyak 30 Kotak dan Tanggal 22 Agustus 2024 Sebanyak 29 Kotak	0,00	1.475.000,00	18.525.000,00
12-09-2024	00284/KW/400371/2024	Biaya Pembelian ATK Bulan September 2024	0,00	2.142.000,00	16.383.000,00
12-09-2024	00286/KW/400371/2024	Biaya Pembelian ATK	0,00	1.841.500,00	14.541.500,00
12-09-2024	00285/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 26 Agustus 2024 Sebanyak 13 Kotak dan Tanggal 27 Agustus 2024 Sebanyak 10 Kotak	0,00	575.000,00	13.966.500,00
13-09-2024	00287/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 28 Agustus 2024 Sebanyak 37 Kotak	0,00	925.000,00	13.041.500,00
19-09-2024	00288/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 3 September 2024 Sebanyak 10 Kotak, Tanggal 9 September 2024 Sebanyak 20 Kotak, dan Tanggal 10 September 2024 Sebanyak 12 Kotak	0,00	1.050.000,00	11.991.500,00

1	2	3	4	5	6
20-09-2024	00289/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 11 September 2024 Sebanyak 41 Kotak dan Tanggal 12 September 2024 Sebanyak 6 Kotak	0,00	1.175.000,00	10.816.500,00
23-09-2024	FPK-PENG-Plk9QKljf6mbw9y	[DARI TUNAI] Penarikan Uang Tunai	0,00	5.000.000,00	5.816.500,00
24-09-2024	00294/KW/400371/2024	Biaya Pembelian ATK Bulan September 2024	0,00	1.159.500,00	4.657.000,00
24-09-2024	00297/KW/400371/2024	Biaya Pembelian ATK Bulan September 2024	0,00	1.063.000,00	3.594.000,00
24-09-2024	00296/KW/400371/2024	Biaya Pembelian Konsumsi Terdakwa Tanggal 17 September 2024 Sebanyak 16 Kotak	0,00	400.000,00	3.194.000,00
26-09-2024	FPK-PENG-akeTLshlxXWa7kf	LS KIMWASMAT	750.000,00	0,00	3.944.000,00
27-09-2024	FPK-PENG-zEtVbRxUkMUfO2O	LS KIMWASMAT	0,00	750.000,00	3.194.000,00
Jumlah			20.750.000,00	17.802.500,00	3.194.000,00

BENDAHARA PENGELUARAN



YOSI HALWAHERA SIPAYUNG
NIP 199512062019032005

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: September 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.05) SUMATERA UTARA / KAB. SIMALUNGUN
 Satuan Kerja : (400371) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
 Tgl, No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.03.2.400371/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (005) Pematang Siantar
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 4.068.425.862,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/PKB/400371/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	4.278.593.901,00	51.331.500,00	261.499.539,00	4.068.425.862,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	4.278.593.901,00	51.331.500,00	261.499.539,00	4.068.425.862,00
B.	BP Selain Kas	4.278.593.901,00	51.331.500,00	261.499.539,00	4.068.425.862,00
	1. BP PNBP	0,00	5.300.500,00	5.300.500,00	0,00
	2. BP DPK	4.278.593.901,00	46.031.000,00	256.199.039,00	4.068.425.862,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	4.068.425.862,00
		(*)
3. Jumlah Kas	Rp	4.068.425.862,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	4.068.425.862,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	4.068.425.862,00
		(*)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	5.300.500,00
		(*)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	5.300.500,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	5.300.500,00
		(*)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

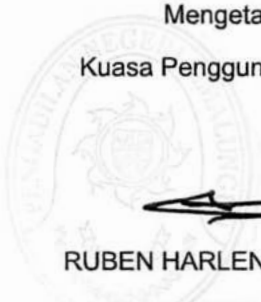
1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	5.300.500,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	5.300.500,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



RUBEN HARLEN PANJAITAN

NIP 198112232009041004

KAB. SIMALUNGUN , 02 Oktober 2024

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'NC', is written over the official stamp of the Bendahara Penerimaan.

NOVA CAROLINA GINTING

Nip 198711222019032006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode September 2024

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 4.068.425.862,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/PKB/400371/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	4.068.425.862
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	4.068.425.862
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	4.068.425.862
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	4.068.425.862
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	4.068.425.862
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	5.300.500
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	5.300.500
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	5.300.500
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

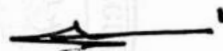


NOVA CAROLINA GINTING

Nip 198711222019032006

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



RUBEN HARLEN PANJAITAN

NIP 198112232009041004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 400371 (PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN)

BULAN : SEPTEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	0006901300001756	RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KC Pematangsiantar	30	000062	10-06-2024	30-09-2024	4,068,425,862.00

Bendahara Penerimaan,



NOVA CAROLINA GINTING

Nip 198711222019032006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (400371)

Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)

Virtual Account : 654444003711000 | BPG 005 PN SIMALUNGUN

Periode : 01-09-2024 s/d 30-09-2024

[illegible]

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-09-23	15:35:09	34180219	From 654444003711000 to 020601009815301 BRIVA1236260013334959CMS DIGIPAY YOSI HA	5.816.500,00	1.159.500,00	0,00	4.657.000,00	CMS	
2024-09-24	14:47:43	34208883	From 654444003711000 to 534101011460537 VA654444003711000konsumsi terdakwa 17 Se	4.657.000,00	400.000,00	0,00	4.257.000,00	CMS	
2024-09-24	14:47:43	34208884	From 654444003711000 to 534101006794535 VA654444003711000ATK september	4.257.000,00	1.063.000,00	0,00	3.194.000,00	CMS	
2024-09-27	08:42:24	34286514	From 032901003295305 to 654444003711000 Pembayaran Belanja Barang Berupa Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pengamatan (KIMWASMAT) Untuk 5 (Lim240051301005120000001	3.194.000,00	0,00	750.000,00	3.944.000,00	SPAN	
2024-09-27	13:58:15	34305317	From 654444003711000 to 528901013497536 VA654444003711000PERJALANAN KIMWASMAT	3.944.000,00	150.000,00	0,00	3.794.000,00	CMS	
2024-09-27	13:58:15	34305318	From 654444003711000 to 011301005400505 VA654444003711000PERJALANAN KIMWASMAT	3.794.000,00	150.000,00	0,00	3.644.000,00	CMS	
2024-09-27	13:58:15	34305319	From 654444003711000 to 001201078473501 VA654444003711000TRANSPORT KIMWASMAT	3.644.000,00	150.000,00	0,00	3.494.000,00	CMS	
2024-09-27	13:58:15	34305320	From 654444003711000 to 208401001694535 VA654444003711000PERJALANAN KIMWASMAT	3.494.000,00	150.000,00	0,00	3.344.000,00	CMS	
2024-09-27	13:58:15	34305321	From 654444003711000 to 534101010177539 VA654444003711000PERJALANAN KIMWASMAT	3.344.000,00	150.000,00	0,00	3.194.000,00	CMS	
			Total Mutasi		17.802.500,00	20.750.000,00			
			Saldo Akhir				3.194.000,00		



Account Statement

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 09-2024
Starting Balance	: IDR 4,278,593,901.00
Ending Balance	: IDR 4,068,425,862.00
Total Transaction Debit	: 13
Total Transaction Credit	: 71
Page	: 1 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	02/09	09:38:44	02/09	09:38:44	98899788324090001 HERPINA SITUMORANG DR 00000001070009970981 NOVA MAI ANDRIAN 000029867926 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	4,278,713,901.00	24090296219997413986
2	02/09	10:27:09	02/09	10:27:09	sisa panjar No 82 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000001070006722377 HERMANTO H SIPA 002058025079 BMRI MANDIRI	328,000.00	0.00	4,278,385,901.00	24090296159990751278
3	02/09	10:41:51	02/09	10:41:51	sisa panjar No 102 PDT. BTH 2024 PNSIM TRF 00000000001993031791 JOKO PRANATA SI 000151703739 BNI 46	1,181,000.00	0.00	4,277,204,901.00	24090296159990751399
4	02/09	11:00:17	02/09	11:00:17	98899788324090002 Berton Haposan Simbolo DR 00000001130010672990 BERTON H SIMBOLO 000020733245 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	4,277,324,901.00	24090296219997428262
5	02/09	11:04:38	02/09	11:04:38	0098899788324090003 ABDI MARULITUA PURBA ABDI MARULITUA PURBA BANK BTN NBMB0000 5221840979863165 729384053614	0.00	120,000.00	4,277,444,901.00	24090299769990487033
6	02/09	20:45:10	02/09	20:45:10	0098899788324090005 MULIADI DR SUKAPTI ALTO PAY 00000005 6372150114090005 564884710802	0.00	120,000.00	4,277,564,901.00	24090293000440455287
7	03/09	09:38:50	03/09	09:38:50	98899788324090004 TASMIN PURBA 8899 000	0.00	818,000.00	4,278,382,901.00	24090300180280000026
8	03/09	13:21:45	03/09	13:21:45	98899788324090006 LIDYA OCTAVIANA HUTABA DR 00000000008300261389 LIDIA OKTAVIANA 000036557358 BCA	0.00	120,000.00	4,278,502,901.00	24090396219997589188
9	03/09	14:29:54	03/09	14:29:54	98899788324090007 PRANSISKO NAINGGOLAN S MOB13000011 REFFESB754902702	0.00	1,578,000.00	4,280,080,901.00	24090330000110036513
10	04/09	08:33:17	04/09	08:33:17	0098899788324090010 AFINI WARHAMNA AFINI WARHAMNA BANK BTN NBMB0000 6013011009973669 730250233606	0.00	120,000.00	4,280,200,901.00	24090499719990962005
11	04/09	13:31:39	04/09	13:31:39	0098899788324090008 ALFIANTO DR ALFIANTO BANK BRI 201039887539 00360062 6013011213387805 000000004372	0.00	598,000.00	4,280,798,901.00	24090493000610634376
12	04/09	14:03:58	04/09	14:03:58	0098899788324090009 HOTMAUHUR WIDIYA IRA HOTMAUHUR WIDIYA IRA BANK BTN NBMB0000 6013013035954341 730385110804	0.00	818,000.00	4,281,616,901.00	24090493000040897429
13	04/09	15:46:37	04/09	15:46:37	sisa panjar No 83 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000001050019013873 IRA LESTARI SID 001359604504 BMRI MANDIRI	572,000.00	0.00	4,281,044,901.00	24090496159990753856
14	04/09	16:26:20	04/09	16:26:20	sisa panjar No 89 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000534901030040536 CANDRA MALAU 000332176867 BRI	614,500.00	0.00	4,280,430,401.00	24090496159990754113
15	04/09	17:14:42	04/09	17:14:42	pnjar eksekusi jadiman 112pdt DR 00000001070033223324 NETTY MEWAHATY S 000023186355 BMRI MANDIRI	0.00	3,850,000.00	4,284,280,401.00	24090496219997732225
16	05/09	09:02:38	05/09	09:02:38	PK CK TQ508139 PN SIM OLH ADE	230,000,039.00	0.00	4,054,280,362.00	24090500198270000005
17	05/09	10:26:49	05/09	10:26:49	DANA20240905DANAIDJ101009993591352LAM TIA DR 00000006285262261206 LAMTIAR APRILYAN 000093591352 unknown	0.00	1,100,000.00	4,055,380,362.00	24090596219997805443
18	05/09	14:15:00	05/09	14:15:00	sisa panjar No 25 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000535201018284531 RIO WILSON SIDA 000906862102 BRI	458,500.00	0.00	4,054,921,862.00	24090596159990753506
19	06/09	11:02:54	06/09	11:02:54	0098899788324090011 JHONNY CHANDRA TURNI DR YEGA AZHARY ALTO PAY 00000005 6372150114090011 796295374963	0.00	120,000.00	4,055,041,862.00	24090693000350482914
20	06/09	12:58:19	06/09	12:58:19	0098899788324090012 JHONNY CHANDRA TURNI DR FLIP-SARI RA ATMB PLUS 015613825043 34101204 5028141563825043 0662325087X0	0.00	120,000.00	4,055,161,862.00	24090693000600467343
21	06/09	14:00:55	06/09	14:00:55	sisa panjar No 58 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000011301018401532 TRY OKTAVIANUS 001711656517 BRI	586,000.00	0.00	4,054,575,862.00	24090696159990753510
22	06/09	14:07:44	06/09	14:07:44	PENGEMBALIAN ECOURT DITOLAKAn. Lelawati TRF 00000534201039887539 ALFIANTO 000867131574 BRI	598,000.00	0.00	4,053,977,862.00	24090696159990753580
23	07/09	08:33:48	07/09	08:33:48	98899788324090013 boston michael sitinja DR 00000000000876700302 BOSTON MICHAEL S 000094810758 BNI 46	0.00	818,000.00	4,054,795,862.00	24090796219998072669
24	07/09	14:53:54	07/09	14:53:54	98899788324090014 AGUS HOT PULUNG PURBAS DR 00000000008200421672 AGUS HOT PULUNG 000057105984 BCA	0.00	16,500.00	4,054,812,362.00	24090796219998121622
25	10/09	12:52:32	10/09	12:52:32	0098899788324090016 EDWARD NAINGGOLAN EDWARD NAINGGOLAN BANK BTN WBNK0000 6013010000000000 509878398795	0.00	13,000.00	4,054,825,362.00	24091093000010366577
26	11/09	09:31:21	11/09	09:31:21	0098899788324090018 LINNY SYAHVITRI KUSU DR AVRIZAL HAMD BANK JAGO JG8888 6391696036159348 024255004111	0.00	33,000.00	4,054,858,362.00	24091193000330975565
27	11/09	12:06:36	11/09	12:06:36	0098899788324090021 ADE JUANITA DR EDY TEGUH PR BKE MB000045 6048200011001666 090132353322	0.00	120,000.00	4,054,978,362.00	24091193000360316305
28	11/09	14:09:43	11/09	14:09:43	0098899788324090022 RIO WILSON SIDAURUK DR UTEN PUTRI S BKE MB000045	0.00	1,148,000.00	4,056,126,362.00	24091193000380326312

Account Statement

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 09-2024
Starting Balance	: IDR 4,278,593,901.00
Ending Balance	: IDR 4,068,425,862.00
Total Transaction Debit	: 13
Total Transaction Credit	: 71
Page	: 2 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
					6048200011001666 090132414919				
29	11/09	14:30:23	11/09	14:30:23	98899788324090020 ELISABET ERNAWATY SIMA DR 00000001070021045549 ELISABET ERNAWAT 000024889312 BMRI MANDIRI 0098899788324090019 CHOKY PERMANA HUTAGA CHOKY PERMANA HUTAGA BANK	0.00	818,000.00	4,056,944,362.00	24091196219998495096
30	12/09	10:57:05	12/09	10:57:05	BTN NBMB0000 5221840985854703 733753639295 0098899788324090025 HERPINA SITUMORANG HERPINA SITUMORANG BANK	0.00	13,500.00	4,056,957,862.00	24091299759990750745
31	12/09	14:09:43	12/09	14:09:43	BTN NBMB0000 5221840922091880 733829053787	0.00	120,000.00	4,057,077,862.00	24091293000040290350
32	13/09	10:02:35	13/09	10:02:35	sisa panjar Banding ecourtNo 10 PDT.G 20 TRF 00000001070019290099 SITI KEPTIYAWAT 000513612404 BMRI MANDIRI 0098899788324090027 ROBBY CHANDRO SINAGA DR COK MALANDO BKE MB000045	30,000.00	0.00	4,057,047,862.00	24091396159990751559
33	13/09	12:03:28	13/09	12:03:28	6048200011001666 090133387777	0.00	818,000.00	4,057,865,862.00	24091393000360164028
34	13/09	13:39:11	13/09	13:39:11	sisa panjar No 115 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000022302040102661 ELISABET ERNAWA 000778833397 BPD SUMATERA UTARA	595,000.00	0.00	4,057,270,862.00	24091396159990753607
35	13/09	14:05:34	13/09	14:05:34	sisa panjar No 28 PDT.G 2024 PNSIM TRF 00000536901003002539 CHOKY PERMANA H 002124647573 BRI	418,000.00	0.00	4,056,852,862.00	24091396159990753804
36	13/09	14:42:47	13/09	14:42:47	DR GOKMAULI SAG BANK BRI 601018113531 6013012244211923 ATM 00360062 REF 000000013348	0.00	1,700,000.00	4,058,552,862.00	24091393000620403004
37	13/09	14:46:53	13/09	14:46:53	0098899788324090028 SUYADI SUYADI BANK BTN NBMB0000 6013011204462260 734262467145	0.00	120,000.00	4,058,672,862.00	24091393000050437071
38	17/09	08:59:53	17/09	08:59:53	DR EDDIE GRACIA DANAMON 5895874301590233 ATM 60140001 REF 000000374907	0.00	3,600,000.00	4,062,272,862.00	24091793000320044087
39	17/09	09:47:24	17/09	09:47:24	98899788324090029 ESRON SILABAN DR 00000000008250280484 ESRON J SILABAN 000098557484 BCA	0.00	33,000.00	4,062,305,862.00	24091796219998840222
40	17/09	14:34:15	17/09	14:34:15	0098899788324090033 MURNI SURYANI HUTASO DR KRISTIKA SIM BKE MB000045 6048200011001666 090135560742	0.00	120,000.00	4,062,425,862.00	24091793000380856853
41	18/09	08:33:37	18/09	08:33:37	DR ULI PASARIBU BANK BRI 6013010000000000 ATM WBNK0000 REF 510016969733	0.00	1,300,000.00	4,063,725,862.00	24091899719990761562
42	18/09	13:16:20	18/09	13:16:20	98899788324090035 DICKY NATALINDO TARIGA DR 00000000008200194161 DICKY NATALINDO 000004182383 BCA	0.00	33,000.00	4,063,758,862.00	24091896219998918642
43	18/09	15:01:45	18/09	15:01:45	DR 23701500046288 DANIEL BERNAT SONI L ESB555704825 6281370231639	0.00	2,300,000.00	4,066,058,862.00	24091830000110833115
44	18/09	15:12:51	18/09	15:12:51	0098899788324090037 MURNI SURYANI HUTAS DR FLIP-SARI RA ATMB PLUS 015613825043 34101204 5028141563825043 0670348736X0	0.00	120,000.00	4,066,178,862.00	24091893000630896583
45	18/09	16:18:54	18/09	16:18:54	98899788324090036 RISDIANTO SARAGIH DR 00000000008255260100 HIJRAH YANI LUBI 000005055152 BCA	0.00	120,000.00	4,066,298,862.00	24091896219998929381
46	19/09	12:37:54	19/09	12:37:54	98899788324090040 Lisbet Sinaga DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000088306591 DBS	0.00	120,000.00	4,066,418,862.00	24091996219998976759
47	19/09	13:20:37	19/09	13:20:37	98899788324090041 boston michael sitinja DR 00000000000876700302 BOSTON MICHAEL S 000009689096 BNI 46	0.00	120,000.00	4,066,538,862.00	24091996219998979326
48	19/09	13:55:58	19/09	13:55:58	98899788324090043 IRFANSHMhum DR 00000000000057337096 HILMA HARMEN 000009733263 BNI 46	0.00	1,013,000.00	4,067,551,862.00	24091996219998981422
49	19/09	15:20:02	19/09	15:20:02	98899788324090042 Netty Mewahaty Simbolo DR 00000001070033223324 NETTY MEWAHATY S 000021837517 BMRI MANDIRI DR RUSLAN HENRI MANDIRI 050002104937	0.00	120,000.00	4,067,671,862.00	24091996219998986309
50	20/09	10:17:15	20/09	10:17:15	6032984828416804 ATM S1RK1KTB REF 8491	0.00	3,710,000.00	4,071,381,862.00	24092099429990946706
51	20/09	14:35:23	20/09	14:35:23	98899788324090044 RAEMA BR PARAP8899 000	0.00	120,000.00	4,071,501,862.00	24092000198270000018
52	21/09	09:38:15	21/09	09:38:15	98899788324090046 Risna Sinaga DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000089316088 DBS	0.00	120,000.00	4,071,621,862.00	24092196219999083244
53	21/09	09:38:16	21/09	09:38:16	98899788324090045 Mika Silvia Saragih DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000089316090 DBS	0.00	120,000.00	4,071,741,862.00	24092196219999083246
54	21/09	15:07:19	21/09	15:07:19	0098899788324090048 MUHAMMAD REZKY SIREG MUHAMMAD REZKY SIREG BANK BTN NBMB0000 6013013094650046 737498604263	0.00	818,000.00	4,072,559,862.00	24092193000060972808
55	23/09	06:15:00	23/09	06:15:00	98899788324090049 Radianan Purba DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000090171495 DBS	0.00	120,000.00	4,072,679,862.00	24092396219999173374
56	23/09	10:51:27	23/09	10:51:27	PENGEMBALIAN ECOURT DITOLAKAn. Gatot And TRF 00000000007123020027 MUHAMMAD REZKY 001275308628 BSI	818,000.00	0.00	4,071,861,862.00	24092396159990751843

Account Statement

Company	: RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA
Account	: 0006901300001756 - RPL 005 PDT PN SML U
Account Organization Unit	: KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
Period	: 09-2024
Starting Balance	: IDR 4,278,593,901.00
Ending Balance	: IDR 4,068,425,862.00
Total Transaction Debit	: 13
Total Transaction Credit	: 71
Page	: 3 of 3

No.	Posting Date	Posting Time	Eff Date	Eff Time	Description	Debit	Credit	Balance	Ref No.
57	23/09	15:31:43	23/09	15:31:43	98899788324090050 Jonli Sinaga DR 00000001070004508323 JONLI SINAGA 000020198778 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	4,072,679,862.00	24092396219999205752
58	23/09	19:04:11	23/09	19:04:11	0098899788324090051 MUHAMMAD REZKY SIREG MUHAMMAD REZKY SIREG BANK BTN NBMB0000 6013013094650046 738368516733	0.00	818,000.00	4,073,497,862.00	24092393000140803496
59	23/09	22:35:24	23/09	22:35:24	98899788324090052 mangembangpandiang DR 00000001070004907277 MANGEMBANG PANDI 000020536773 BMRI MANDIRI	0.00	1,748,000.00	4,075,245,862.00	24092396219999227463
60	24/09	09:47:29	24/09	09:47:29	PANJAR KASASI NO 121/PDT-G/2023/PN-SIM	0.00	1,600,000.00	4,076,845,862.00	24092400174740000002
61	24/09	13:33:02	24/09	13:33:02	- DR 00000000003491445449 DIMAS HUTABARAT 000029991745 BCA	0.00	1,900,000.00	4,078,745,862.00	24092496219999256291
62	25/09	10:41:00	25/09	10:41:00	98899788324090053 Abdulah Sahala Sembiri DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENERA 000091370691 DBS	0.00	120,000.00	4,078,865,862.00	24092596219999338289
63	25/09	11:06:32	25/09	11:06:32	98899788324090054 Andria Ningsih DR 00000001070020414316 JAMIKA IHWA WILD 000026117930 BMRI MANDIRI	0.00	120,000.00	4,078,985,862.00	24092596219999342342
64	25/09	13:41:31	25/09	13:41:31	0098899788324090056 DAULAT SIHOMBING DAULAT SIHOMBING BANK BTN NBMB0000 6013011106714180 739073349689	0.00	17,500.00	4,079,003,362.00	24092593000030534446
65	25/09	18:58:44	25/09	18:58:44	98899788324090057 Sudi H Panggabean DR 00000001080018828815 ANGGA HARAHA P 000022349821 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	4,079,821,362.00	24092596219999403863
66	26/09	10:53:29	26/09	10:53:29	98899788324090055 Tagora Samosir DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000092215194 DBS	0.00	120,000.00	4,079,941,362.00	24092696219999459418
67	26/09	12:51:59	26/09	12:51:59	98899788324090058 DOLLY BENHARD SIAGIAN DR 00000000000278393935 DOLLY BENHARD SI 000018192529 BNI 46	0.00	818,000.00	4,080,759,362.00	24092696219999471082
68	26/09	13:14:50	26/09	13:14:50	0098899788324090059 SITINORMA PARDEDE DR RENSISTER SI BPD SUMUT 402090003436 01006167 6274860143354812 000176285390	0.00	120,000.00	4,080,879,362.00	24092693000610179020
69	26/09	14:50:26	26/09	14:50:26	98899788324090060 MUHAMMAD AFANDI DR 00000000008255260100 HIJRAH YANI LUBI 000040752958 BCA	0.00	120,000.00	4,080,999,362.00	24092696219999481430
70	26/09	16:03:42	26/09	16:03:42	0098899788324090061 HORAS SIMANGUNSONG HORAS SIMANGUNSONG BANK BTN NBMB0000 6013012087041353 739565856948	0.00	120,000.00	4,081,119,362.00	24092693000080598382
71	27/09	08:52:32	27/09	08:52:32	98899788324090064 Josep Otnario Harianja DR 00000001080024036734 JOSEP OTNARIO HA 000023761706 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	4,081,937,362.00	24092796219999542813
72	27/09	10:00:15	27/09	10:00:15	98899788324090066 Edi TH Sidabutar DR 00000000000702598494 DOMPET ANAK BANG 000066548983 PERMATABANK PERMATA BANK	0.00	120,000.00	4,082,057,362.00	24092796219999552518
73	27/09	11:02:52	27/09	11:02:52	DR 00000528601014533537 SYARIFUDDIN TAUF 000012966453 BRI	0.00	1,400,000.00	4,083,457,362.00	24092796219999561670
74	27/09	11:56:44	27/09	11:56:44	0098899788324090063 JOSIA MANGIHUT T MAN DR JOSIA MANGIH BANK BCA ACMB9503 6019005030971258 000000447631	0.00	120,000.00	4,083,577,362.00	24092793000350944095
75	27/09	14:19:08	27/09	14:19:08	98899788324090068 Gokmauli Sagala SH DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENTERA 000093032883 DBS	0.00	19,000.00	4,083,596,362.00	24092796219999586981
76	27/09	14:54:01	27/09	14:54:01	98899788324090071 FERNANDO YOSUA HUTASOI DR 00000000008255260100 HIJRAH YANI LUBI 000046083312 BCA	0.00	120,000.00	4,083,716,362.00	24092796219999591032
77	27/09	14:56:27	27/09	14:56:27	98899788324090069 MUHAMMAD AFANDI DR 00000000008255260100 HIJRAH YANI LUBI 000046097638 BCA	0.00	120,000.00	4,083,836,362.00	24092796219999591353
78	27/09	16:12:55	27/09	16:12:55	98899788324090072 DAULAT SIHOMBING DR 00000000008000659577 DAULAT SIHOMBING 000046556959 BCA	0.00	818,000.00	4,084,654,362.00	24092796219999600489
79	27/09	21:14:09	27/09	21:14:09	98899788324090065 DEWI SARTIKA PURBA DR 00000000003320129923 FLIPTECH LENERA 000093302397 DBS	0.00	818,000.00	4,085,472,362.00	24092796219999633729
80	28/09	11:29:24	28/09	11:29:24	98899788324090067 Herpina Situmorang DR 00000001830002181336 SANDY ONGKI ARNO 000029402675 BMRI MANDIRI	0.00	818,000.00	4,086,290,362.00	24092896219999680956
81	28/09	11:37:46	28/09	11:37:46	0098899788324090073 SUDIIMAN LAOLI SUDIIMAN LAOLI BANK BTN NBMB0000 5221840930918256 740306072499	0.00	818,000.00	4,087,108,362.00	24092899779990980699
82	30/09	10:33:06	30/09	10:33:06	PK CK TQ508140 PN SIM OLH ADE	20,000,000.00	0.00	4,067,108,362.00	24093000198270000020
83	30/09	11:20:07	30/09	11:20:07	98899788324090074 MARTIN HUTABARAT SH MOB13000011 REFFESB990308826	0.00	17,500.00	4,067,125,862.00	24093030000110435581
84	30/09	14:02:35	30/09	14:02:35	Lainnya DR 00000001070021045549 ELISABET ERNAWAT 000022255378 BMRI MANDIRI	0.00	1,300,000.00	4,068,425,862.00	24093096219999878678
Total						256,199,039.00	46,031,000.00		



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : **296**/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan
Bank Tempat Pembukaan Rekening

Simalungun, 3 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Merujuk pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
2. Surat kami Nomor W2.U16/3138/Ku.01.1/9/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening;
3. Surat Saudara Nomor S-571/KPN.0204/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun;

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan rekening dari :

Nomor rekening : 0113.01.002826.30.4

Nama rekening : RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA

Bank : Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar

ke Bank Tabungan Negara KC. Pematang Siantar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bank BTN mendukung layanan perbankan berbasis elektronik/*e-banking* yang mempermudah transaksi/pembayaran terkait biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bank BTN siap untuk mendukung pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Bank BTN berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada rekening penampung biaya perkara.

Adapun jenis rekening, tujuan penggunaan, sumber dana, perlakuan jasa giro, dan mekanisme penyaluran dan rekening adalah sama sebagaimana pada surat kami tersebut di atas.

Apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Soraya Rizna Afrijal
NIP. 199110032014032004

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

SURAT KUASA

Nomor 297/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soraya Rizna Afrijal, S.H.
NIP : 199110032014032004
Jabatan : Plt. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Memberikan kuasa penuh kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah;

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga atas seluruh rekening kategori Pemerintah Pusat pada PT. Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar atas nama RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA, untuk melakukan pengelolaan rekening yang tidak terbatas pada :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2. Melakukan blokir atas rekening;
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening Kas Umum Negara.

Surat kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun, 3 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Soraya Rizna Afrijal
NIP. 199110032014032004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-295/KPN.0204/2024 13 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas
Nama Pengadilan Negeri Simalungun

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 3 Mei 2024 Nomor 296/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024 hal Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening Dana Penampungan Dana Titipan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pematangsiantar untuk keperluan Penampungan Dana Titipan Untuk Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun. Rekening tersebut akan diberi nama: **RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA.**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk:

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - b. Melaporkan penutupan Rekening lama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - c. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (setiap bulannya).
 - d. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - e. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - f. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila:
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pematang Siantar, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dengan motto CETAR : Cepat, Transparan, dan Responsif.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 340/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pembukaan Rekening
Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL
005 PDT PN SML UNTUK BIAYA
PERKARA

Simalungun, 28 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Nomor S-295/KPN.0204/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar pada tanggal 14 Mei 2024, dengan nomor rekening : 00069-01-30-000175-6, nama rekening : "RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA".

Bersama ini juga kami sampaikan agar rekening tersebt dimasukkan dalam program *Treasury Notional Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Soraya Rizna Afrijal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai laporan.

No. : **334** /S/STRN/2024
Lamp : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Nomor Rekening

Pematangsiantar, 14 Mei 2024

Kepada Yth:
Ibu Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Di
Jalan Asahan KM. 4 Marihat Baris, Simalungun

Dengan hormat,

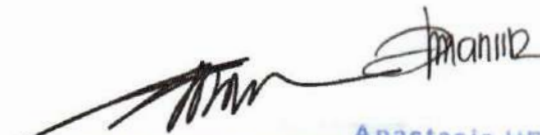
Pertama-tama diucapkan terima kasih atas kepercayaan **Pengadilan Negeri Simalungun** kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematangsiantar, semoga kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini dapat ditingkatkan lagi.

Dengan ini disampaikan nomor rekening yang telah dibentuk untuk menampung dana titipan atas nama Pengadilan Negeri Simalungun dengan detail sebagai berikut:

Nama	Nomor Rekening
RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA	00069-01-30-000175-6

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Kantor Cabang Pematangsiantar


Anastasia HERM
Yudhistiro Eko Sejati DBM Business
PJ Branch Manager



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 341/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.5/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening
Pemerintah Lainnya Atas Nama RPL
005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA
PERKARA

Simalungun, 28 Mei 2024

Yth. Kepala KPPN Pematangsiantar
Jl. Brigjend. Rajamin Purba Nomor 119,
Pematangsiantar 21111

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Nomor S-295/KPN.0204/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Dana Titipan Atas Nama Pengadilan Negeri Simalungun, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rekening sebagai berikut :

Nomor rekening : 0113.01.002826.30.4
Nama rekening : RPL 005 PDT PN SIMAL UNTUK BIAYA PERKARA
Bank : Bank Rakyat Indonesia KC. Pematang Siantar

Telah ditutup pada tanggal 27 Mei 2024 dengan saldo Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Soraya Rizna Afrijal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai laporan.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Wilayah Medan
Telepon :
Facsimile :
Website : <http://www.bri.co.id>

Model 54

SANGAT SEGERA

Nomor : B.1369.e-KC/OPS/05/2024 27 Mei 2024
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Rekening Pemerintah lainnya (RPL) Pihak Ketiga Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Di Tempat

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan baik selama ini, dan kepercayaan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Simalungun kepada Bank BRI Kantor Cabang Pematang Siantar untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada Pengadilan Negeri Simalungun.

Menindaklanjuti surat Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1117/PAN.PN.W2.U2/HK.2.4/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Penutupan Rekening Pemerintah lainnya (RPL) Pihak Ketiga, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No Rekening : 0113.01.002826.30.4
Nama Rekening : RPL 005 PDT PN Simalungun Untuk Biaya Perkara Lainnya
Jenis Rekening : Giro

Pada Bank BRI Cabang Pematang Siantar sejak tanggal **27 Mei 2024** telah kami lakukan penutupan rekening

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
SUB FUNGSI OPERASIONAL LAYANAN



SYAHLUN SIRAIT
ASISTEN MANAJER OPERASIONAL & LAYANAN

Tindasan
1. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 460/SEK.PN.W2-U16/KU1.1.3/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
NIP : 198112232009041004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Simalungun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara milik Pengadilan Negeri Simalungun pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan nomor rekening : 00069-01-30-000175-6, nama rekening : "RPL 005 PDT PN SML UNTUK BIAYA PERKARA" untuk periode Juni 2024 senilai Rp1.467.118,00;
2. Seluruh Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) tersebut telah kami setorkan ke kas negara dan telah dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tidak terdapat lagi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang digunakan sebagai rekening penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk periode setelah Juni 2024.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simalungun, 15 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ruben Harlen Panjaitan

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Transfer Keluar ke PN. Simalungun

Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST)

Nomor :

Tanggal :

Pengiriman Buku Agenda Sidang Hakim, Buku-buku Pengadilan, Register-register Pengadilan dan
Perlengkapan Persidangan Lainnya

NO		NAMA BARANG	ALOKASI	HARGA SATUAN	TOTAL
2		Buku Jurnal Keuangan Perkara PT			
	1010301014	1. KII-A1			Rp -
		2. KII-A2			Rp -
		3. KII-A3			Rp -
3		Buku Jurnal Keuangan Perkara PN dan Buku Jurnal Keuangan PHI			
	1010301014	1. KI-A1/P	5 ✓	✓	Rp -
		2. KI-A1/G	4 ✓		Rp -
		3. KI-A2	4 ✓		Rp -
		4. KI-A3	4 ✓		Rp -
		5. KI-A4	4 ✓		Rp -
		6. KI-A5	4 ✓		Rp -
		7. PHI			Rp -
4		Buku Induk Keuangan Perkara PN			
	1010301014	1. KI-A7	4 ✓		Rp -
		2. KI-A8	4 ✓		Rp -
		3. KI-A9	4 ✓		Rp -
5		Buku Register Perdata PT dan PN			
	1010301014	1. Register Induk Perkara Perdata Gugatan PN	4 ✓		Rp -
		2. Register Induk Perkara Perdata Permohonan PN	5 ✓		Rp -
		3. Register Permohonan Perkara perdata Banding PN	1 ✓		Rp -
		4. Register Permohonan Perkara Perdata Kasasi PN	1 ✓		Rp -
		5. Register Penyitaan PN	1 ✓		Rp -
		6. Register Eksekusi PN	1 ✓		Rp -
		7. Register Permohonan PK Perkara Perdata PN	1 ✓		Rp -
		8. Register Induk Perdata PT			Rp -
6		Buku Register Pidana PT dan PN			
	1010301014	1. Register Induk Perkara Pidana PT			Rp -
		2. Register Penahanan PT			Rp -
		3. Register Induk Perkara Pidana Biasa PN	15 ✓		Rp -
		4. Register Induk Perkara Pidana Singkat PN	1 ✓		Rp -
		5. Register Induk Perkara Pidana Banding PN	2 ✓		Rp -
		6. Register Induk Perkara Pidana Kasasi PN	1 ✓		Rp -
		7. Register Grasi	1 ✓		Rp -
		8. Register Induk Perkara Pidana Cepat PN	1 ✓		Rp -
		9. Register Ijin / Persetujuan Penggeledahan PN	1 ✓		Rp -
		10. Register Ijin / Persetujuan Penyitaan PN	1 ✓		Rp -
		11. Register Tindak Pidana Ringan	1 ✓		Rp -
		12. Register Barang Bukti	2 ✓		Rp -
		13. Register Permohonan PK Perkara Pidana PN	1 ✓		Rp -
		14. Register Pra Peradilan	4 ✓		Rp -
		15. Register Penahanan PN	13 ✓		Rp -
7		Register Perkara Pidana Anak			
	1010301014	1. Register Induk Permohonan Banding Perkara Pidana Anak PT			Rp -
		2. Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak	2 ✓		Rp -
		3. Register Induk Pidana Singkat Anak	2 ✓		Rp -
		4. Register Perkara Tindak Pidana Ringan Anak	1 ✓		Rp -
		5. Register Permohonan Banding Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		6. Register Permohonan Pidana Kasasi Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		7. Register Penahanan Anak	2 ✓		Rp -
		8. Register Permohonan PK Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -
		9. Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi	1 ✓		Rp -
		10. Register Kesepakatan Diversi	1 ✓		Rp -
		11. Register Permohonan Grasi Perkara Pidana Anak	1 ✓		Rp -

8		Register Perkara Pidana Tipikor			
	1010301014	1.	Register Induk Perkara Tipikor		Rp
		2.	Register Permohonan Banding Tipikor		Rp
		3.	Register Permohonan Kasasi Tipikor		Rp
		4.	Register Permohonan PK Tipikor		Rp
		5.	Register Penahanan Tipikor		Rp
		6.	Register Penggeledahan Tipikor		Rp
		7.	Register Penyitaan Tipikor		Rp
		8.	Register Barang Bukti Tipikor		Rp
		9.	Register Permohonan Grasi Tipikor		Rp
		10.	Register Induk Tipikor Pengadilan Tinggi		Rp
9		Register Perkara Perdata Niaga			
	1010301014	1	Register Induk Kepailitan		Rp
		2	Register Umum Perkara Kepailitan		Rp
		3	Register Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan		Rp
		4	Register Permohonan PK Perkara Kepailitan		Rp
		5	Register Induk Perkara HAKI		Rp
		6	Register Permohonan Kasasi Perkara HAKI		Rp
		7	Register Permohonan PK Perkara HAKI		Rp
		8	Register Induk Perkara PKPU		Rp
		9	Register Permohonan Kasasi PKPU		Rp
		10	Register Permohonan Setelah Putusan PKPU		Rp
		11	Register Induk Perkara Gugatan Lain-Lain		Rp
		12	Register Permohonan Kasasi Gugatan Lain-Lain		Rp
		13	Register Permohonan PK Gugatan Lain-Lain		Rp
10		Register Perkara Hubungan Industrial			
	1010301014	1.	Register Induk Gugatan PHI		Rp
		2.	Register Eksekusi PHI		Rp
		3.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Mediasi		Rp
		4.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Konsiliasi		Rp
		5.	Register Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit		Rp
		6.	Register Penyitaan PHI		Rp
		7.	Register Pendaftaran Arbitrase		Rp
		8.	Register Permohonan Kasasi PHI		Rp
		9.	Register Permohonan PK PHI		Rp
		10.	Register Keuangan PHI		Rp
		BUKU KAS BANTU PN DAN PT			
		1	Buku Kas Bantu PT	3 ✓	
		2	Buku Kas Bantu PN		
		SKUM			
		1	SKUM	2 ✓	
11		Bendera Mahkamah Agung RI			
	1010307006	1	Bendera Mahkamah Agung RI	1 ✓	Rp
12		PALU			
	1010307006	1	Palu	1	Rp
JUMLAH TOTAL				115	

PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA

(Sbraya P. A)
NIP. 199110032014032004

PIHAK PERTAMA
YANG MENYERAHKAN

T. JANSEN